

Lampung Post

Tribun Lampung

Halaman

Radar Lampung

12

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021
							<input checked="" type="checkbox"/>						

Bansos Mei-Juni segera Cair

Total penerima bantuan ini untuk Lampung sebanyak 638.836 penerima.

ATIKA OKTARIA

KABAR baik bagi masyarakat penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Lampung. Pasalnya, bantuan Pemerintah Pusat itu segera disalurkan untuk dua bulan.

Kabar baik itu disampaikan Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Aswarodi saat dikonfirmasi *Lampung Post*, Kamis (8/7).

"Untuk bantuan masyarakat terdampak Covid-19 itu BST, bantuan ini ada keberatan dari Kementerian Sosial. Nantinya penerima akan mendapatkan bantuan dua bulan berturut-turut, yakni Mei dan Juni dan

akan tersalurkan pada Juli ini," kata Aswarodi.

Soal waktunya, mantan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung itu menuturkan tidak lama lagi. Namun pastinya masih menunggu koordinasi dengan pihak kementerian. Adapun total penerima bantuan ini untuk Lampung sebanyak 638.836 penerima.

Sementara itu, untuk rekap keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dari data tiga bank Himbara, yakni BNI, BRI, dan Mandiri, yakni sebanyak 183.485 penerima dengan total nilai penerimaan sebanyak Rp124,472 miliar lebih.

"Jadi KPM PKH terbagi dari

tiga bank yang masing terdata dari 15 kabupaten dan kota. Untuk masing-masing bank ada BNI memegang 50 KPM, BRI memegang data 59.788 penerima, dan Bank Mandiri memegang 123.646 data KPM," ujarnya.

Persyaratan

Selanjutnya, Aswarodi mengatakan saat ini banyak masyarakat yang datanya terkendala dan tidak dapat menerima bantuan. Hal itu, menurutnya, disebabkan berbagai macam hal. Mulai dari tidak memiliki KTP elektronik sehingga tidak terdata, meninggal, graduasi (mengundurkan diri dari penerima) hingga data dari Dsdukcapil yang tidak sama.

"Ada juga masyarakat yang tidak terdata meskipun telah melakukan sjuan. Tapi untuk PKH dan BPNT memang akan

terus dilakukan pengecekan sehingga akan terlihat jika memang memenuhi syarat. Namun untuk bantuan BST itu langsung dari kementerian," ujarnya.

Adapun data dari 15 kabupaten/kota yang terdata adalah untuk jumlah data yang harus diperbaiki ada 1.847.257 penerima. Lalu data belum padan dengan Dukcapil sebanyak 95.496 penerima, meninggal 2.397 penerima, diusulkan penghapusan 62.301 penerima, dan tidak ada KTP 5.330 penerima.

"Khusus untuk BST, memang semua data ada terpusat di Kemensos dan Kantor Pos. Tapi memang ada beberapa masyarakat yang mengajukan keluhan, dan kami sampaikan serta tindak lanjut," ujarnya. (S)